



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AJAT SUDRAJAT**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN**
3. NHK : **267780**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Bangunan Seluas 22 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 503.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO - Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA HATCHBACK Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 600 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. LAINNYA, UNITED MOUNTAIN BIKE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. LAINNYA, UNITED SEPEDA LIPAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
6. MOTOR, HONDA CB 500XAN IN M/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



7. MOTOR, YAMAHA XMAX 250 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.
67.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.007.111.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 113.431.978

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.673.542.978

III. HUTANG Rp. 24.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.649.542.978

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.